

**Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM – SD) Oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.**

(Suatu Study di SD GMIM Sonder Kecamatan Sonder)

Utari N. F. Tinangon

J. H. Posumah

Gustaaf. Buddy. Tampi

utaritinangon059@gmail.com

Abstrak

This study aims to determine the implementation of the Elementary School Poor Student Assistance (BSM-SD) program by the Education Office of Sonder District, Minahasa Regency (a study at SD GMIM Sonder, Sonder District). The research method used in this study is a qualitative descriptive method and uses the policy implementation process according to S. Van Meter and Carl E. Van Horn as the research focus, namely 1) Standards and policy objectives, 2) Resources, 3) Characteristics of implementing agents, 4) Communication between organizations and strengthening activities, and 5) Attitudes of implementors (implementor disposition. Informants of this research are State Civil Apparatus at the Education Office of Minahasa Regency, school principals and administrative staff at SD GMIM Sonder, and parents of students. Process Data collection was carried out by conducting observations, interviews and documentation. The results showed that the Implementation of the Primary School Poor Student Assistance Program (BSM-SD) by the Education Office of Sonder District, Minahasa District (a study at SD GMIM Sonder Sonder District) had succeeded in achieving the desired goals. , and has been implemented properly and optimally. The communication that exists The relationship between the office related to the school and the parents of students has also been well established, although there are still some mechanisms that are not in accordance with the existing conditions. The policy implementers have also understood the policies related to aid for poor students well, so that the services and information received by the recipients of aid can be conveyed and received properly. The social, economic and political environment is also one of the good supports in the implementation of this policy at SD GMIM Sonder.

Keywords: Policy Implementation, Poor Student Assistance Program

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implemmentasi program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa (suatu study di SD GMIM Sonder Kecamatan Sonder). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif serta menggunakan proses implementasi kebijakan menurut S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sebagai focus penelitian, yaitu 1) *Standar dan sasaran kebijakan*, 2) *Sumber daya*, 3) *Karakteristik agen pelaksana*, 4) *Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas*, dan 5) *Sikap para implementor (disposisi implementor*. Informan penelitian ini adalah Aparatut Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kab. Minahasa. Kepala sekolah serta pegawai Tata Usaha di SD GMIM Sonder, dan orang tua siswa. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa (suatu study di SD GMIM Sonder Kecamatan Sonder) sudah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, serta telah dilaksanakan dengan baik dan secara maksimal. Komunikasi yang terjalin antara dinas terkait denga sekolah dan orang tua siswa juga sudah terjalin dengan baik walaupun masih ada beberapa mekanisme yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Para implementor kebijakan juga sudah memahami kebijakan terkait bantuan siswa miskin ini dengan baik, sehingga pelayanan dan informasi yang diterima oleh penerima bantuan bisa tersampaikan dan diterima dengan baik. Lingkungan social, ekonomi dan politik juga menjadi salah satu penunjang yang baik dalam terimplementasinya kebijakan ini di SD GMIM Sonder.

Kata Kunci : Implementasi,Program,Bantuan,Siswa Miskin

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan suatu bangsa atau negara karena kemajuan suatu bangsa sangatlah tergantung pada sejauh mana tingkat pendidikan serta penguasaan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Ini berarti bahwa pendidikan harus dilakukan mulai dari tingkat yang paling rendah yaitu Taman Kanak – Kanak, Sekolah Menengah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai kepada perguruan tinggi.

Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudoyono tahun 2005 mengurangi subsidi BBM dan merealokasikan sebagian besar dananya ke empat program besar yang terdiri dari (1) Program BOS dan Bantuan Siswa Miskin, (2) Jaminan Pelayanan Kesehatan, (3) Infrastruktur Pedesaan, (4) Subsidi Langsung Tunai khususnya untuk masyarakat miskin akibat dari meningkatnya harga BBM.

Kemudian pada era pemerintahan Jokowi melalui Kemendikbud menetapkan Bantuan Siswa Miskin menjadi Program BSM. Program BSM adalah program bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada peserta didik baik sekolah negeri maupun swasta, yang orang tuanya miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Penetapan sasaran Program BSM, dari yang semula melalui sekolah, telah diubah

menjadi Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga melalui pemberian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan. Kartu ini diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima Program BSM agar menjangkau anak-anak sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia.

Mekanisme Penyaluran Manfaat Program BSM juga diubah yaitu dari penyaluran manfaat BSM satu tahun penuh menjadi penyaluran manfaat dua kali (setiap semester) di dalam satu tahun anggaran, yaitu pada antara bulan Januari - Juni untuk semester II dan bulan Juli – Desember untuk semester I

Adapun besarnya jumlah dana yang disalurkan ke penerima manfaat program BSM adalah sebagai berikut :

Jenjang	Besarnya Dana BSM
SD/MI	Rp. 450.000
SMP/MTS	Rp. 750.000
SMA/SMK/MA	Rp. 1.000.000

Dari paparan permasalahan implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa (suatu study di SD GMIM Sonder Kecamatan Sonder).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Webster dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, (2018) bahwa implementasi adalah : “Those action by public or private

individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan)”. menurut

Nugroho (2018), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2018) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Menurut Peter De Leon dan Linda De Leon yang dikutip oleh Nugroho (2018) terdapat beberapa model implementasi kebijakan yaitu, (1). Model implementasi Van Mater dan Van Horn, (2). Model implementasi George C. Edward III, (3). Model implementasi Grindle.

Pengertian Kemiskinan

Menurut BPS (2011) menyatakan pendapat mengenai kemiskinan yaitu : “Definisi umum kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain : terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik”.

Bantuan Siswa Miskin

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan (2013) memberikan definisi mengenai BSM adalah sebagai berikut : “Bantuan bagi siswa miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.”

Secara umum tujuan pemberian BSM adalah mengamankan program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar dua belas tahun (Pendidikan Menengah Universal). Secara khusus program BSM ini bertujuan :

1. Menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak.
2. Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah.
3. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran.
4. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bahkan hingga tingkat menengah atas.

Dasar hukum pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Kecamatan Sonder didasari pada pedoman perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Periode 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014.
9. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Sasaran program BSM APBNP adalah siswa miskin yang pada tahun pelajaran 2020/2021 masih berstatus sebagai siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta memenuhi sekurang-kurangnya satu dari kriteria sebagai berikut:

1. Siswa yang orangtuanya menerima Kartu Perlindungan Sosial;
2. Siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin;
3. Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH;
4. Yatim dan/atau piatu;
5. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, atau indikator lokal lainnya).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. fokus dalam penelitian ini yang dapat mengukur implementasi suatu program bantuan siswa miskin menurut model kebijakan Van Mater dan Van Horn menggunakan 6 variabel yaitu : (1). Standar dan sasaran kebijakan, (2). Sumber daya, (3). Komunikasi antar

organisasi dan penguatan aktivitas, (4). Karakteristik agen pelaksana, (5). Disposisi implementor, (6). Kondisi social, ekonomi dan politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap menguasai, memahami dan tau tentang objek penelitian, dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Tata Usaha, Orang tua siswa dan Siswa. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1 Standar dan sasaran kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa, Bantuan Siswa Miskin di tujukan untuk siswa yang kurang mampu dan yatim piatu yang kesulitan dalam biaya pendidikan sehingga harus putus sekolah. Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti untuk menentukan sasaran yang tepat dalam program BSM menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan sasaran, salah satu contohnya dalam menentukan sasaran siswa yang tidak mampu atau siswa yatim piatu, yang menjadi masalah tidak semua anak yatim piatu merupakan siswa tidak mampu. Akan tetapi pencapaian dari tujuan dari program ini dapat dikatakan berhasil karena beberapa siswa yang mendapatkan bantuan ini merasa terbantu dan meringankan beban orang tua.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme untuk menentukan sasaran, anak miskin dan yatim piatu masih perlu diperbaiki, sedangkan tujuan dari program ini sudah berhasil dalam membatu persoalan ekonomi siswa yang kurang mampu.

2 Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan informan bahwa, sumber daya merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, mulai dari bagaimana melakukan pembagian tugas dalam mensosialisasikan BSM.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti sumber daya yang ada dinas pendidikan dan sekolah sudah sangat mendukung programan ini, serta kesiapan para pelaksan dalam melakukan sosialisasi kepada siswa dan orang tua serta proses kerja sama antara kepala sekolah, wali kelas dan tu selaku penanggung jawab dari program ini sangat baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya dan kerja sama yang dilakukan sudah baik, pihak sekolah sudah melaksanakan implementasi program ini dengan maksimal

3 Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa, indicator sumber daya berkaitan dengan komunikasi dalam memberikan informasi dan pengimputan data agar tidak mengalami kesalahan sehingga informasi dalam pemberian pemahaman mudah di pahami dan di jalankan oleh orang tua siswa/i.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti komunikasn dan sumber daya sangat berkaitan selama pengimplementasian program ini komunikasi dari kepala sekolah dan dinas penidikan, arahan dari kepala sekolah, guru BK dan wali kelas yang bekerja sama dengan baik menjadikan informasi tersampaikan dengan baik kepada siswa dan orang tua.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan sumber daya sangat berkaitan, semakin baik SDM yang ada maka

komunikasi setiap para pelaksan juga baik. Komunikasi setiap para pelaksana harus selalu di lakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan

4 Karakteristik agen pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan informan bahwa, kebijakan BSM dalam karakteristik agen pelaksana telah menjalankan sesuai dengan SOP dan kategori tekanan berasal dari keluhan wali murid yang tidak dapat mengindahkan himbauan dan/ atau pemberitahuan dari pihak sekolah.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti karakteristik agen pelaksana dan standar dan sasaran kebijakan berkaitan dimana yang menjadi pokok permasalahan mekanisme yang ada seperti keluhan dari orang tua siswa kurang mampu yang tidak mendapat bantuan program indonesia pintar, akan tetapi SOP yang ada sudah cocok dengan kebijakan ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam indicator karaktersitik agen pelaksana SOP yang di berlakukan sudah sesuai dengan kebijakan, hanya saja fregmentasi atau keluhan masih di rasakan pihak sekolah karena beberapa orang tua mengeluh akibat anak mereka tidak mendapatkan bantuan BSM

5 Sikap para implementor (disposisi implementor)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan informan bahwa, para pelaksana dari dinas pendidikan dan sekolah, memahami dan menerima kebijakan program indonesia pintar serta mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti sikap para pelaksana memang memahami apa tujuan dari kebijakan ini sehingga mereka melaksanakan

implementasi kebijakan ini dengan maksimal, dengan memberikan informasi kepada siswa dan orang tua.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor sudah melaksanakan tugas dalam implementasi kebijakan ini dengan baik karena mereka memahami bagaimana kebijakan ini, dalam memberikan pelayanan dan memberikan informasi sudah sangat baik.

6. Kondisi social, ekonomi dan politik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa lingkungan sosial dan politik berpengaruh penting terhadap keberhasilan kebijakan program indonesia pintar yang dilihat dari dukungan dari orang tua dan staf khusus yang mendorong dan membantu dalam kebijakan program tersebut.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti lingkungan sosial dan politik dalam implementasi program BSM orang tua mendukung program tersebut karena bantuan ini mengurangi beban mereka serta staf khusus yang membantu dalam keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, lingkungan sosial ekonomi dan politik, menjadi salah satu penunjang menjadikan program Bantuan Siswa Miskin ini bisa mencapai tujuan yang di harapkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan untuk menentukan sasaran anak miskin dan yatim piatu masih perlu diperbaiki, sedangkan tujuan dari program ini sudah berhasil dalam membantu persoalan ekonomi siswa yang kurang mampu.
2. Sumber Daya dan kerja sama yang

dilakukan sudah baik, pihak sekolah sudah melaksanakan implementasi program ini dengan maksimal.

3. Komunikasi Antar Organisasi, komunikasi dan sumber daya sangat berkaitan, semakin baik SDM yang ada maka komunikasi setiap para pelaksana juga baik. Komunikasi setiap para pelaksana harus selalu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Karakteristik Agen Pelaksana, karakteristik agen pelaksana dan standar dan sasaran kebijakan memiliki keterkaitan dimana pokok permasalahan dari kebijakan ini yaitu mekanisme yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada seperti siswa kurang mampu atau siswa yatim piatu yang tidak dapat karena tidak memiliki KPS.
5. Disposisi Implementor, disposisi implementor sudah melaksanakan tugas dalam implementasi kebijakan ini dengan baik karena mereka memahami bagaimana kebijakan ini, dalam memberikan pelayanan dan memberikan informasi sudah sangat baik
6. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik, lingkungan sosial ekonomi dan politik, menjadi salah satu penunjang menjadikan program bantuan siswa miskin ini bisa mencapai tujuan yang di harapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan masukan untuk Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Pada Jenjang Sekolah Dasar Di SD GMIM Sonder sebagai berikut:

1. Memperbaiki mekanisme yang ada karena program indonesia pintar ini di tujukan untuk siswa miskin dan yatim piatu tapi ada beberapa siswa yang tidak mendapatkan bantuan tersebut karena mekanisme yang tidak pas.
2. Memberikan pelayanan yang baik

terlebih pada pengimputan data siswa agar lebih memerhatikan sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, 2018, *Public Policy; Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wahab, 2018, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andi A. E. P. Abram, Femmy M. G. Tulusan, Very Y. Londa, 2018, *Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Smk Negeri 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Sulawesi Utara
- Orina Kogoya, Martha Ogotan, Very Y. Londa, 2020, *Implementasi Program Beras Sejahteradi Desa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny-Jaya*. Papua
- Tendean E. Desyra, Salmin Dengo, Very Y. Londa, 2021, *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso*, Minahasa
- Mefry Y. Pandoh, Patar Rumapea, Martha Ogotan, 2015, *Implementasi Kebijakan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Pada Sdn Di Kecamatan Lembean Timur*. Minahasa
- Cecelia H. Sasuwuk, Florence D. Lengkong, Novie A. Palar, 2021, *Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea*. Minahasa